PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 63 Telp. (0451) 456399
PALU 94111
www.bkd.sultengprov.go.id

# PENGUMUMAN

Nomor : 870/1636/BKD

TENTANG

## SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/479/BKD-GUB.ST/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Rincian Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 Tanggal 19 Desember 2022 Perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian formasi terlampir sebagai berikut :

### I. RINCIAN FORMASI SERTA LOKASI PENEMPATAN

Rincian formasi serta lokasi penempatan yang telah diinput ke dalam portal http:SSCASN.bkn.go.id 2022 terlampir.

### II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
8. Berijazah sesuai dengan formasi jabatan yang dipilih oleh pelamar, yaitu :
   a. Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   b. Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
9. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
   b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
   c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan :

1) Dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam -menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

10. Bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) huruf a berlaku Nilai Ambang Batas jenis kebutuhan yang dilamar;
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima nol);

**III. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar;
2. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
3. Memiliki pengalaman paling singkat paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
4. Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
   a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
   b. paling rendah Direktur / Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;

**IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN**

1. Pendaftaran/Registrasi dilaksanakan secara *online* ke alamat website Portal SSCASN https://sscasn.bkn.go.id;
2. Calon pelamar wajib memiliki e-mail yang masih aktif/berlaku;
3. Untuk melakukan pendaftaran secara *online* pelamar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang akan digunakan saat melakukan pendaftaran pada Portal Nasional SSCASN 2022;
4. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah, untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan pada 1 (satu) periode pendaftaran;
5. Pelamar diberikan masa sanggah untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Instansi dapat mengubah keputusan hasil seleksi administrasi apabila sanggahan dari calon pelamar terbukti dan dapat diterima;
6. Pada saat pelamar melakukan pendaftaran secara *online*, wajib mengunggah (*upload*) hasil scan dokumen dan file video yang dibutuhkan yaitu :
   a. Asli Surat Lamaran ditulis tangan dengan tulisan rapi dan jelas terbaca, menggunakan tinta hitam, ditulis dengan HURUF BALOK ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000 atau meterai tempel Rp. 10.000, format terlampir (Tipe File PDF Max 500 KB);
   b. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 cm (Tipe File JPG Max 300 KB);
   c. Kartu Tanda Penduduk Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Tipe File JPG Max 500 KB);
   d. Ijazah asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar (Tipe File PDF Max 1000 KB);
   e. Transkrip Nilai Asli (Tipe File PDF Max 1000 KB);
   f. Asli Surat pernyataan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak TMT PPPK, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000 atau Meterai tempel Rp. 10.000 oleh pelamar, format terlampir. Dalam hal peserta seleksi tetap mengajukan pindah maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri (Tipe File PDF Max 1000 KB);
   g. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000 atau Meterai tempel Rp. 10.000 oleh calon pelamar, format terlampir (Tipe File PDF Max 1000 KB);
   h. Asli dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, bagi pelamar Formasi Khusus Disabilitas (Tipe File PDF Max 1000 KB);
   i. File video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar bagi pelamar Formasi Khusus Disabilitas (Upload alamat link Video di Portal SSCASN atau bisa menghubungi helpdesk BKD Provinsi Sulawesi Tengah);
   j. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar sesuai angka 4 (empat) pada romawi III (Tipe File PDF Max 700 KB);
   k. e-Meterai Rp. 10.000 atau Meterai tempel 10.000 hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pada dokumen yang akan dibubuhi e-Meterai atau Meterai tempel Rp. 10.000.

7. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke data base SSCASN;

## V. PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi;
2. Syarat mengikuti ujian dengan membawa :
   a. ASLI Kartu Tanda Penduduk, apabila dalam keadaan yang mendesak maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
   b. ASLI Kartu Tanda Peserta Ujian;
   c. Vaksin lengkap dosis II yang dibuktikan dengan Aplikasi Peduli Lindungi.
3. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
4. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui website ***http://bkd.sultengprov.go.id***
5. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
6. Peserta ujian menggunakan pakaian :
   a. Pria : Kemeja putih, celana panjang hitam dan memakai sepatu.
   b. Wanita : Kemeja putih, Jilbab hitam (bagi yang menggunakan), rok/celana panjang warna hitam dan memakai sepatu (**tidak diperkenankan memakai baju kaos, celana jeans dan sendal**).
7. Peserta ujian di dalam ruang tes dilarang membawa :
   a. Buku-buku dan catatan lainnya;
   b. Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, gelang, kalung, headset dan lain-lain;
   c. Makanan dan minuman;
   d. Senjata api/tajam dan sejenisnya.
8. Prinsip dan Penentuan Kelulusan yaitu :
   Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan nilai hasil akhir Seleksi Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara;
9. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NI PPPK oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPPK;
10. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan CASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;

## VI. KETENTUAN LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk PPPK adalah 5 tahun;
2. Tempat dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan di http://bkd.sultengprov.go.id;
3. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2022 hanya dapat dilihat di situs *online* **https://bkn.go.id**, **http://sscasn.bkn.go.id** atau melalui http://bkd.sultengprov.go.id;
4. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 2 (dua) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi proses pelaksanaan seleksi bukan menjadi tanggungjawab tim seleksi;
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CASN dan dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (**calo**) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CASN, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **berhak menggugurkan kelulusan** tersebut dan/atau **diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN**, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Untuk mengikuti seluruh Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2022, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
8. Keputusan Tim Pengadaan CASN Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
9. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui http://bkd.sultengprov.go.id;
10. Call Center dan Help Desk terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dapat menghubungi nomor **0821-8865-0956** (**hanya menerima WhatsApp dan Sms**) pada hari kerja Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 15.00 Wita;

## VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS

| No. | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 1. | Pengumuman Seleksi | 20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023 |
| 2. | Pendaftaran Seleksi | 21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023 |
| 3. | Seleksi Administrasi | 21 Desember 2022 s.d. 11 Januari 2023 |
| 4. | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 12 s.d. 15 Januari 2023 |
| 5. | Masa Sanggah | 16 s.d. 18 Januari 2023 |
| 6. | Jawab Sanggah | 19 s.d. 25 Januari 2023 |
| 7. | Pengumuman Pasca Sanggah | 26 s.d. 28 Januari 2023 |
| 8. | Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta | 18 s.d. 22 Februari 2023 |
| 9. | Penarikan Data Final | 23 s.d. 24 Februari 2023 |
| 10. | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 25 Februari s.d. 1 Maret 2023 |
| 11. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi | 2 s.d. 7 Maret 2023 |
| 12. | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 10 Maret s.d. 3 April 2023 |
| 13. | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan | 20 Maret s.d. 6 April 2023 |
| 14. | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 26 Maret s.d. 8 April 2023 |
| 15. | Pengumuman Kelulusan | 9 s.d. 11 April 2023 |
| 16. | Masa Sanggah | 12 s.d. 14 April 2023 |
| 17. | Jawab Sanggah | 14 s.d. 20 April 2023 |
| 18. | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah | 27 s.d. 29 April 2023 |
| 19. | Pengisian DRH NI PPPK | 30 April s.d. 22 Mei 2023 |
| 20. | Usul Penetapan NI PPPK | 23 Mei s.d. 20 Juni 2023 |

**Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui - *https://sscasn.bkn.go.id* atau dapat dilihat langsung di *http://bkd.sultengprov.go.id***

**Palu, 20 Desember 2022**

**An. GUBERNUR SULAWESI TENGAH**
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI**
**SULAWESI TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**ASRI, SH.,M.Si**
**Pembina Utama Madya**
**Nip.19641105 199309 1 001**

**LAMPIRAN PENGUMUMAN**
**NOMOR : 870/1636/BKD**
**TANGGAL : 20 Desember 2022**

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL | S-1 MANAJEMEN<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN<br>S1 ADMINISTRASI NEGARA<br>S-1 ILMU SOSIAL<br>S-1 SOSIAL<br>S-1 SOSIOLOGI<br>S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | 2 | DINAS SOSIAL PROVINSI , KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN |
| 2 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 4 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , SEKERTARIS , KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET |
| 3 | AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | S-1 KEARSIPAN | 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 4 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I , KEPALA CABANG DINAS, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 5 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 EKONOMI<br>S-1 SOSIAL | 3 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , KEPALA DINAS , SEKERTARIS, SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 6 | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA | S-1 SASTRA INDONESIA DAN SENI<br>S-1 BUDAYA ANTROPOLOGI | 6 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS, BIDANG KEBUDAYAAN |
| 7 | AHLI PERTAMA - PERENCANA | S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN<br>S-1 TERAPAN<br>S-1 SOSIAL<br>S-1 ILMU ALAM | 2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 8 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 KOMPUTER<br>S-1 INFORMATIKA | 2 | BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN & INOVASI DAERAH , KEPALA BADAN<BR>SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM |
| 9 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 KOMPUTER | 1 | BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN & INOVASI DAERAH , KEPALA BADAN , SEKRETARIS , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 10 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S1 ADMINISTRASI NEGARA<br>S-1 SOSIAL | 1 | BIRO ORGANISASI , KEPALA BIRO ORGANISASI , KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK, KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA DAN BUDAYA KINERJA |
| 11 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V , KEPALA UPT, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS, BIDANG PEMBINAAN PKPLK |
| 13 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS, UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| 14 | AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL | D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL<br>D-IV PEKERJAAN SOSIAL<br>S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL | 1 | DINAS SOSIAL PROVINSI , KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| 15 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI , KEPALA UPT, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK |
| 16 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I , KEPALA CABANG DINAS, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK |
| 17 | AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN | S-1 PERTANIAN | 3 | KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG , KEPALA UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH TPH |
| 18 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM |
| 19 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMASI KOMPUTER<br>S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER<br>D-IV KOMPUTER | 1 | BIRO ORGANISASI , KEPALA BIRO ORGANISASI , KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 20 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S1 ADMINISTRASI NEGARA<br>S-1 SOSIAL | 2 | BIRO ORGANISASI , KEPALA BIRO ORGANISASI , KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN , KEPALA SUB BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN |
| 21 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S1 ADMINISTRASI NEGARA<br>S-1 SOSIAL | 1 | BIRO ORGANISASI , KEPALA BIRO ORGANISASI , KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI, KEPALA SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI |
| 22 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V , KEPALA UPT, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK |
| 23 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | S-1 EKONOMI<br>S-1 AKUNTANSI<br>S-1 MANAJEMEN | 1 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH , KEPALA BADAN , SEKRETARIS , KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN UMUM |
| 24 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | S-1 PERIKANAN | 4 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , KEPALA DINAS , UPT KELAUTAN DAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I , KEPALA UPT |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S1 ADMINISTRASI NEGARA<br>S-1 SOSIAL | 1 | BIRO ORGANISASI , KEPALA BIRO ORGANISASI , KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI, KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI |
| 26 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI , KEPALA UPT, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA |
| 27 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III , KEPALA UPT, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK |
| 28 | AHLI PERTAMA - PERENCANA | S-1 PERENCANAAN WILAYAH<br>S-1 EKONOMI<br>S-1 ILMU SOSIAL<br>S-1 HUMANIORA<br>S-1 ILMU ALAM | 3 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , SEKERTARIS , KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM |
| 29 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II , KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 30 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II , KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK |
| 31 | AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI | S-1 EKONOMI | 3 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN |
| 32 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI , KEPALA UPT, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 33 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I , KEPALA CABANG DINAS, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA |
| 34 | AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM | S-1 HUKUM | 1 | BIRO HUKUM , KEPALA BIRO HUKUM , KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM , KEPALA SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAM |
| 35 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II , KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA |
| 36 | AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI | S-1 EKONOMI | 3 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 5 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , SEKERTARIS , KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM |
| 38 | AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | S-1 TEKNIK SIPIL<br>S-1 TEKNIK ARSITEKTUR LANDSCAPE | 1 | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BIDANG PERUMAHAN , KEPALA SEKSI PEMANTAUAN & EVALUASI PERUMAHAN |
| 39 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 KOMPUTER<br>S-1 INFORMATIKA | 1 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH , KEPALA BADAN , SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASE |
| 40 | AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL | S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL | 1 | DINAS SOSIAL PROVINSI , KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
| 41 | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 EKONOMI<br>S-1 TEKNIK<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 2 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BID PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN |
| 42 | AHLI PERTAMA - PENELITI | S-2 PERTANIAN<br>S-2 HORTIKULTURA<br>S-2 PENELITIAN<br>S-2 PERKEBUNAN<br>S-2 KIMIA | 3 | BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN & INOVASI DAERAH, KEPALA BADAN |
| 43 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL |
| 44 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BID PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN |
| 45 | AHLI PERTAMA - PERENCANA | S-1 EKONOMI | 1 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH , KEPALA BADAN , SEKRETARIS , KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET |
| 46 | AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN | S-1 HUKUM<br>S-1 PERTANIAN<br>S-1 KEHUTANAN | 35 | DINAS KEHUTANAN PROVINSI |
| 47 | AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN | S-1 MANAJEMEN<br>S-1 ILMU KELAUTAN | 2 | KEPALA DINAS , KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT |
| 48 | AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI | S-1 EKONOMI | 3 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI |
| 49 | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 EKONOMI<br>S-1 SOSIAL | 2 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL |
| 50 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S1 ADMINISTRASI NEGARA<br>S-1 SOSIAL | 1 | BIRO ORGANISASI , KEPALA BIRO ORGANISASI , KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK, KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA |
| 51 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 ADMINITRASI PUBLIK<br>S-1 ADMINITRASI NEGARA<br>S-1 ILMU ADMINISTARI NEGARA | 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 53 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS, BIDANG PEMBINAAN SMK |
| 54 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV , KEPALA UPT, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK |
| 55 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III , KEPALA UPT, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA |
| 56 | AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL | D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL<br>D-IV PEKERJAAN SOSIAL<br>S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL | 2 | DINAS SOSIAL PROVINSI , KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN |
| 57 | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 EKONOMI<br>S-1 SOSIAL | 4 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL |
| 58 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 HUKUM<br>S-1 EKONOMI<br>S1 ADMINISTRASI NEGARA<br>S-1 PEMERINTAHAN<br>S-1 MANAJEMEN<br>S-1 SOSIAL<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK<br>S-1 INFORMATIKA | 2 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , SEKERTARIS , KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM |
| 59 | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 MANAJEMEN<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK<br>S-1 AGROTEKNOLOGI | 2 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |
| 60 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S1 ADMINISTRASI NEGARA<br>S-1 SOSIAL | 1 | BIRO ORGANISASI , KEPALA BIRO ORGANISASI , KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN , KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI JABATAN DAN KOMPETENSI JABATAN |
| 61 | PEMULA - POLISI KEHUTANAN | SMA - SMK | 5 | DINAS KEHUTANAN PROVINSI |
| 62 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV , KEPALA UPT, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA |
| 63 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI , KEPALA DINAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | S-1 ILMU ADMINISTRASI<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN<br>S-1 TEKNIK SIPIL<br>S-1 ARSITEKTUR<br>S-1 SOSIOLOGI<br>S-1 GEOGRAFI<br>S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL<br>S-1 GEOLOGI<br>S-1 PLANOLOGI | 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN |
| 65 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | S-1 EKONOMI<br>S-1 AKUNTANSI<br>S-1 MANAJEMEN | 3 | BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN & INOVASI DAERAH , KEPALA BADAN , SEKRETARIS , KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET |
| 66 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III , KEPALA UPT, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 67 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | S-1 EKONOMI<br>S-1 AKUNTANSI<br>S-1 MANAJEMEN | 4 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , SEKRETARIS , KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET |
| 68 | AHLI PERTAMA - PERENCANA | S-1 EKONOMI | 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH , KEPALA BADAN , SEKRETARIS |
| 69 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 KOMPUTER | 1 | DINAS KESEHATAN PROVINSI , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN. KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| 70 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR | D-IV PERIKANAN<br>S-1 PERIKANAN<br>S-1 ILMU KELAUTAN | 5 | KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT |
| 71 | AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | S-1 PERTANIAN | 2 | KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG , KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN |
| 72 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | D-IV ADMINISTRASI<br>S-1 KEBIJAKAN PUBLIK<br>S-1 PEMERINTAHAN<br>S-1 MANAJEMEN<br>S-1 ADMINISTRASI<br>S-1 INFORMATIKA | 1 | BIRO HUKUM , KEPALA BIRO HUKUM , KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 73 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S1 ADMINISTRASI NEGARA<br>S-1 SOSIAL | 1 | BIRO ORGANISASI , KEPALA BIRO ORGANISASI , KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI, KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| 74 | AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM | S-1 HUKUM | 1 | BIRO HUKUM , KEPALA BIRO HUKUM , KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM , KEPALA SUB BAGIAN LITIGASI |
| 75 | AHLI PERTAMA - PERENCANA | S-1 EKONOMI | 3 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , KEPALA DINAS , SEKERTARIS , SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET |
| 76 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV , KEPALA UPT, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 77 | AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR | S-1 PSIKOLOGI | 3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | S-1 KELAUTAN<br>S-1 PERIKANAN | 9 | KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP |
| 79 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | S-1 HUKUM<br>S-1 EKONOMI<br>S-1 ILMU SOSIAL<br>S-1 TEKNIK<br>S-1 SOSIAL<br>S-1 ILMU ALAM | 1 | KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN , KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 80 | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 HUKUM<br>S-1 EKONOMI<br>S-1 SOSIAL | 6 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN |
| 81 | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 BAHASA<br>S-1 SASTRA INDONESIA<br>S-1 BAHASA INGGRIS<br>S-1 SOSIAL<br>S-1 HUMAS | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS, UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| 82 | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 EKONOMI<br>S-1 SOSIAL | 5 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS , KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL |
| 83 | AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | S-1 MANAJEMEN | 1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI , KEPALA DINAS |
| 84 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 KEPEGAWAIAN<br>S-1 MANAJEMEN<br>S-1 KOMUNIKASI<br>S-1 SDM | 3 | BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN & INOVASI DAERAH , KEPALA BADAN , SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 85 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS, BIDANG PEMBINAAN SMA |
| 86 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TKJ<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER<br>S-1 KOMPUTER<br>S-1 SISTEM INFORMATIKA<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , KEPALA DINAS , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V , KEPALA UPT, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| **T O T A L** | | | **204** | |

**An. GUBERNUR SULAWESI TENGAH**
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI**
**SULAWESI TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**ASRI, SH.,M.Si**
**Pembina Utama Madya**
**Nip.19641105 199309 1 001**

# CONTOH SURAT LAMARAN DITULIS TANGAN

Palu,

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengangkatan CASN 2022

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Sulawesi Tengah
Di-
Palu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Caton Aparatur Sipil Negara (CASN) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, mohon perkenan Gubernur Sulawesi Tengah mengikutkan Kami dalam seleksi tersebut. Berikut identitas diri dan jabatan yang dilamar :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| Tempat tanggal lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Agama | : | |
| NIK | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Kategori | : | PPPK Tenaga Teknis |
| Nama Jabatan Dilamar | : | |
| Nomor telepon / HP | : | |
| Alamat Email | : | |

Sebagai bahan pertimbangan, bersarna ini Kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Ijazah terakhir berikut Trankrip Nilai yang telah dilegalisir
2. KTP Nasional
3. Pas Foto Latar Merah uk. 3 x 4 cm
4. Surat Pernyataan yang ditandatangi dan di bubuhi e-Meterai dengan redaksi terlampir
5. Asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis tingkat/disabilitas (bagi pelamar Formasi Penyandang Disabilitas)
6. File Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (bagi pelamar Formasi Penyandang Disabilitas)
7. Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Dikti-Kemendikbudristek atau Surat Keterangan Ijazah (bagi lulusan PT Luar Negeri).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan bantuan Bapak, Kami Ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

10.000

ttd

(.....)

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | SMK/SMA/D-III/S-1 ..... (Jurusan/Kualifikasi Pendidikan) |
| Agama | : | |
| Alamat | : | |

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Palu, ..... 2022
Yang membuat pernyataan,

Dibubuhi
E- Materai
10.000

TTD

*Nama dan gelar*

*Catatan :*
*1) Surat Pernyataan diketik menggunakan computer sesuai format.*
*2) Menggunakan Materai Elektronik bukan materai fisik yang ditempel.*
*3) Tanda Tangan menggunakan tinta hitam.*

# CONTOH SURAT TIDAK MENGAJUKAN PINDAH

**SURAT PERNYATAAN**
**PENGABDIAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

NIK :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bersedia mengabdi pada Instansi Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah selama paling kurang 5 (Lima) Tahun sejak diangkat menjadi PPPK dan/atau sesuai periode masa hubungan kerja sejak diangkat menjadi PPPK.

2. Apabila tetap mengajukan permohonan pindah maka pengajuan tersebut dianggap sebagai pernyataan pengunduran diri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia dituntut di muka pengadilan apabila dikemudian hari terbukti pernytaan saya ini tidak benar.

Palu,

Yang Membuat Pernyataan

10.000

.....

CONTOH